

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik, Carlton Clymer Roode (2000:2) menyatakan bahwa kata “politik” pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles (384-322 S.M) melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Dengan itu dia ingin menjelaskan, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam pengertian luas semua masyarakat adalah politisi, walaupun hanya sebagian (pejabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik daripada yang lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, politik adalah proses pembagian kekuasaan pada satu komunitas (masyarakat), pembagian kekuasaan tersebut merupakan proses pembagian tugas dan kewajiban serta pengambilan kebijakan untuk kepentingan komunitas tersebut. Proses pembagian kekuasaan tersebut kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan dan berkembang menjadi negara, sebagai pengambil kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama (kolektif) yaitu tujuan negara.

Di Indonesia masyarakat seringkali merasa “alergi” ketika dihadapkan dengan kata “politik”, padahal politik memiliki tujuan yang baik, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Politik seringkali diartikan sebagai kewajiban segelintir elit saja. Masyarakat beranggapan bahwa politik itu sesuatu yang kotor dan “tabu” karena tindakan para oknum yang tidak patut di ranah politik. Kondisi masyarakat yang seperti ini terus berlanjut sehingga melupakan bahwa mereka adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari politik itu sendiri. Bahwa masyarakat bukan objek politik tetapi sekaligus subjek politik, yang juga dapat menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh para kepala daerah.

Masyarakat memiliki porsi (bagian) yang sangat menentukan kebijakan pemerintah, karena merupakan sumber dan tujuan kebijakan. Keputusan politik

sebenarnya berasal dari masyarakat sendiri. Keputusan tentang sembilan bahan pokok (sembako) murah tentu berasal dari keinginan masyarakat untuk memperoleh sembako murah. Dan kebijakan pemerintah tentang sembako murah akan dinikmati oleh masyarakat juga. Disinilah posisi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek politik, dan hal inilah yang luput dari pengamatan/kesadaran masyarakat tentang posisi mereka di ranah politik/kebijakan.

Dalam perkembangan selanjutnya peran masyarakat semakin terlihat dengan adanya pemilu langsung (*one man one vote*). Peran masyarakat terlihat jelas, karena masyarakat secara independen dapat menyatakan pilihan politiknya dengan memberikan suara untuk memilih salah satu calon (presiden/kepala daerah). Peran masyarakat sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan politik terutama pada saat pemilihan umum berlangsung.

Pemilihan umum pertama di Indonesia dilakukan pada tahun 1955, bertujuan untuk memilih anggota DPR dan *konstituante* (lembaga negara yang bertugas untuk membuat undang-undang). Pemilihan umum sampai tahun 2014 telah dilaksanakan 11 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Yang membedakan proses pemilu tersebut adalah proses pemilihan dan hasil dari pemilu, pemilu yang dilaksanakan tahun 1955-1999 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat pusat (sekarang DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tingkat I provinsi dan tingkat II kabupaten/kota madya. Sementara untuk memilih presiden dan kepala daerah (gubernur, walikota dan bupati) dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD yang terpilih pada saat pemilu.

Namun sejak runtuhnya rezim orde baru (ORBA) dan banyaknya tuntutan reformasi terutama dari kalangan mahasiswa, dan disahkannya Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tahun 2004 dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama di Indonesia, dan dengan disahkannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun 2005 pemilihan umum kepala daerah

(pemilukada) dilaksanakan secara langsung melibatkan seluruh masyarakat sesuai daerah masing-masing.

Setelah penerapan pemilukada secara langsung, semakin jelaslah peran masyarakat di ranah politik. Peran masyarakat dalam menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah mereka. Peran masyarakat yang sangat penting ini sebaiknya diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam memilih dan memilah para calon kepala daerah yang bertarung di pemilukada. Bukan hanya sekedar memilih saja, tetapi dengan kesadaran penuh dan objektif dalam menilai para calon yang ada. Memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kemampuan untuk mengolah sumber daya yang ada di daerah yang akan mereka pimpin.

Proses untuk mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas untuk memimpin bukanlah perkara yang mudah, masyarakat dituntut untuk memilih secara objektif, kritis dan berimbang (*fair*). Penilaian yang berdasarkan pikiran rasional dan independen serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa pengaruh dari pihak lain. Di lain sisi masyarakat berhadapan dengan sisi gelap demokrasi yang menggoda masyarakat untuk memilih berdasarkan kepopuleran, kedekatan hubungan keluarga, atau bahkan karena tekanan dari pihak tertentu, dan *money politik* (politik uang). Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu pemilih dalam proses penyeleksian calon yang akan mereka pilih berdasarkan aspek-aspek yang sama untuk semua calon agar mendapatkan siapa calon yang akan mereka pilih menjadi pemimpin.

Untuk membangun aplikasi yang dapat membantu calon pemilih, dibutuhkan sebuah metode. Metode yang digunakan adalah metode *profile matching*, metode ini merujuk pada penelitian Yeyen Fajriyani yaitu dengan judul “Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan dengan Metode *Profile Matching*”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. penelitian ini merupakan pembangunan sistem pendukung keputusan untuk memilih kepala daerah yang akan digunakan oleh calon pemilih, sedangkan penelitian sebelumnya membangun sistem pendukung keputusan untuk seleksi penerimaan karyawan baru.
2. penelitian sebelumnya menggunakan tiga aspek yang digunakan dalam proses penilaian yaitu: aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku, sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan aspek kecerdasan
3. penelitian tentang penggunaan metode *profile matching* dalam pilkada belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel dalam menilai merujuk pada penelitian Yeyen Fajriyani yang menggunakan metode yang sama.

Dengan adanya penilaian dengan kriteria yang sama, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari segala intervensi dalam proses pemilihan dan tentu memilih dengan lebih objektif. Sistem yang dapat digunakan untuk menilai calon-calon pemimpin secara berimbang tanpa ada tendensius terhadap salah satu pihak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan latar belakang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pemilih pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)?
2. Bagaimana implementasi metode *profile matching* dalam sistem pendukung keputusan untuk digunakan dalam pemilihan kepada daerah?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Membangun sistem pendukung keputusan untuk membantu warga masyarakat dalam menilai calon kepala daerah sebelum memutuskan untuk memilih salah satu calon.

Midian Sihotang, 2016

**RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENILAI ASPEK KECERDASAN CALON KEPALA DAERAH DENGAN METODE PROFILE MATCHING**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Mengimplementasikan metode *profile matching* dalam sistem pendukung keputusan dalam proses pilkada.

#### 1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah bagi pembahasan kasus dan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kasus dititikberatkan pada penggunaan metode dalam proses pilkada.
2. Faktor-faktor penilaian yang digunakan belum pernah digunakan untuk dalam proses penilaian pasangan calon kepala daerah.
3. Hasil penilaian calon pemilih bukan bertujuan untuk memprediksi kemenangan salah satu pihak.
4. Pengguna diasumsikan sudah melakukan diskusi dan terlibat debat calon-calon yang ada.
5. Penilaian calon kepala daerah hanya berdasarkan aspek kecerdasan.

#### 1.5 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan Data
  - a. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *browsing* internet dan berbagai artikel yang berkaitan dengan topik baik *textbook* atau *paper*.

- b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil.

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang akan dibangun merupakan perangkat lunak berbasis *web*, sehingga metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode *web engineering* (Rogers Pressman, 2004) metode tersebut merupakan modifikasi dan penyempurnaan dari metode perangkat lunak konvensional sehingga cocok untuk pengembangan suatu perangkat lunak berbasis *web*.

Midian Sihotang, 2016

**RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENILAI ASPEK KECERDASAN CALON KEPALA DAERAH DENGAN METODE PROFILE MATCHING**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini merupakan gambaran umum yang mencakup format-format skripsi. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi pembahasan masalah secara umum, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi acuan untuk pelaksanaan penelitian yang meliputi: teori pengambilan keputusan, konsep sistem pendukung keputusan, teori pemerintahan dan dasar hukum pilkada, serta teori metode *profile matching*.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Penjelasan tentang metodologi pengembangan sistem yang digunakan dengan pendekatan terstruktur serta alat dan bahan yang digunakan untuk membangun sistem.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu proses penelitian, pengembangan perangkat lunak dan pengujian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian dan saran-saran dalam meningkatkan kualitas penelitian.

### **Lampiran**

Berisi dokumen-dokumen yang mendukung keabsahan penelitian

